

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Teluk Bintuni merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Papua Barat, Indonesia. Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni memiliki banyak pusat kegiatan ekonomi yang dekat dengan garis pantai dan teluk, tempat dimana terdapat berbagai macam industri yang bergerak di bidang pertambangan, kehutanan, dan kelautan berdiri di tanah Papua. Dengan banyaknya kegiatan industri, membuat Teluk Bintuni menjadi Kabupaten Terkaya di Indonesia berdasarkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Teluk Bintuni berada di posisi pertama sebagai kabupaten terkaya di Indonesia dengan PDRB per kapita sebesar Rp487,41 juta (dalam Aditiya, 2021, para. 10).

Meskipun menjadi wilayah kabupaten terkaya di Indonesia, karena menghasilkan sumber daya alam yang melimpah, persoalan tentang penyalahgunaan sumber daya alam masih terjadi, seperti eksploitasi dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Teluk Bintuni (Arifin, komunikasi pribadi, 19 Agustus, 2021).

Hal tersebut tentunya berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU), pada periode 2016 hingga 2020 menunjukkan isu tentang perubahan iklim yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem meningkat 16% di seluruh dunia, di Asia, mengalami peningkatan drastis hingga 190%, khusus di Indonesia mencapai angka 53% (“Isu Kerusakan Lingkungan”, 2021, para. 2). Di sisi lain, beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga kurang berpihak kepada kelestarian lingkungan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu pemicu yang mengancam kelestarian sumber daya hayati yang ada.

Pengendalian yang kurang bijaksana terhadap proses eksploitasi alam untuk kebutuhan manusia pada akhirnya akan menggiring manusia pada persoalan besar, yaitu bagaimana keberlanjutan hidup jika sumber-sumber daya alam habis tereksploitasi dan lingkungan menjadi rusak sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebagai tempat keberlangsungan hidup. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (dalam Putri, 2021, para. 6).

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Bintuni adalah gas alam dengan cadangan 14,3 TCF dan terdapat juga terdapat potensi minyak bumi (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 22). Salah satu perusahaan yang aktif dalam kegiatan pengeboran di wilayah Teluk Bintuni adalah perusahaan BP Tangguh yang sudah beroperasi sejak tahun 2008, pengeboran ini mengambil kawasan di lepas pantai dan daratan di sekitar kawasan Teluk Bintuni (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 20). Eksploitasi gas bumi oleh BP Tangguh ini berpotensi menghasilkan polusi. Sebaliknya dapat pula menjadi pemicu perkembangan wilayah disekitar pertambangan.

Kegiatan eksploitasi gas alam ini, selain berdampak pada lingkungan juga berdampak pada sosial, kesehatan, dan keamanan. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebagian masyarakat setempat mungkin telah menjadi bagian dari proses industrialisasi yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Tetapi, seperti juga terjadi di daerah yang lain, tidak jarang penduduk setempat dalam beberapa hal juga menjadi korban situasi dan terpaksa harus menanggung akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang lepas kendali.

Perencanaan pembangunan tata guna lahan untuk wilayah Teluk Bintuni seharusnya tidak mengganggu dan merusak ekosistem alam yang ada termasuk tidak mengganggu kehidupan flora dan fauna yang terdapat didalamnya. Kerusakan atau hilangnya suatu habitat tentunya akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem sehingga dapat menyebabkan dampak negatif bagi siklus kehidupan. Daerah rawa yang ditumbuhi oleh hutan bakau sangat berperan dalam untuk perkembangbiakan berbagai jenis ikan dan udang yang hasil penangkapan komoditi ini tidak hanya untuk dikonsumsi oleh wilayah Teluk Bintuni, tetapi hasilnya diekspor di manca negara. Pemanfaatan potensi ikan dan binatang perairan ini harus memperhatikan keseimbangan ekosistem untuk menghindari terjadinya kelangkaan jenis ikan atau binatang perairan lainnya.

Seharusnya pembangunan harus selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama dari *Sustainable Development Goals* adalah untuk menerapkan keseimbangan dalam pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020, p. 1).

Jika mengacu pada elemen tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dalam pemanfaatan sumber daya alam juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tentang kebijakan ekosistem daratan yang berisi tentang pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Mengurangi laju deforestasi di Indonesia, dan mengurangi laju degradasi hutan (Bappenas, 2020, p. 9).

Selain persoalan tentang penyalahgunaan sumber daya alam, angka kemiskinan juga masih menjadi persoalan di Teluk Bintuni. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni (“Kabupaten Teluk Bintuni”, 2021), pada tahun 2020 menunjukkan sebanyak 19,22 ribu angka kemiskinan dari total 87 ribu penduduk yang ada di Teluk Bintuni. Garis kemiskinan Teluk Bintuni juga terus meningkat, mengutip dari *rri.co.id*, tercatat pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar Rp. 549.169 perkapita per bulan, tahun 2017 Rp. 583.323, tahun 2018 Rp. 587.770, tahun 2019 Rp. 644.838, hingga tahun 2020 sebesar Rp. 683.667 per kapita per bulan (“Angka Kemiskinan”, 2021, para. 5).

Data lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa Teluk Bintuni menempati posisi ke-29 dari 548 kabupaten/kota dalam kategori jumlah masyarakat miskin yang ada di Indonesia, dengan persentase sebanyak 29,39 persen masyarakat miskin secara ekonomi yang terdapat di Teluk Bintuni (“Persentase Penduduk Miskin”, 2020). Selain itu, hingga tahun 2021, pemerintah masih memiliki hutang sebesar Rp32,4 miliar terhadap masyarakat adat Suku Sebyar bersama lima Distrik yang berada di Teluk Bintuni, terkait dana bagi hasil bumi dan gas yang diproduksi oleh BP LNG Tangguh dan pembayaran sisa kompensasi terkait penyelesaian dana Hak Ulayat (“Senator Filep Dukung”, 2021, para. 1-2). Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa masih terdapatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah Teluk Bintuni.

Di balik permasalahan eksploitasi lingkungan dan kemiskinan yang masih terjadi, terdapat keindahan bentang alam di Kabupaten Teluk Bintuni yang menyimpan potensi wisata alam dan dapat dikembangkan menjadi objek wisata guna menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Potensi pariwisata di sektor bahari, ekowisata, wisata budaya dan sejarah, serta wisata pendidikan dan penelitian yang dimiliki oleh Kabupaten Teluk Bintuni bagi pengembangan kegiatan pariwisata di masa mendatang sangat besar. Meskipun saat ini keanekaragaman hayati yang ada di Teluk Bintuni belum semuanya dikenali oleh masyarakat dan belum terdata secara lengkap.

Sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki kondisi iklim tropis dan memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati kelautan sangat tinggi, wilayah Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4 *ecoregion*. *Ecoregion* merupakan suatu kesatuan besar dari wilayah daratan, lautan, dan kehidupan dari beragam karakteristik spesies dan kondisi lingkungan (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 22). Salah satu daerah *ecoregion* adalah Kabupaten Teluk Bintuni yang termasuk ke dalam kelompok *ecoregion Solomon Bismark Seas*, karena kawasan laut Kabupaten Teluk Bintuni terdapat ekosistem hutan tropis, hutan pantai, padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan, daratan pulau (“Gambaran Umum dan Kondisi”, n.d., p. 24).

Keanekaragaman ekosistem yang ada menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu tempat habitat berbagai jenis tumbuhan dan satwa, baik yang terdapat di perairan maupun di darat. Jika dilihat secara geografis, Teluk Bintuni memiliki konfigurasi hutan mangrove sangat luas. Luas kawasan hutan mangrove di Teluk Bintuni tercatat sekitar 260 ribu hektar atau sekitar 52 persen dari total keseluruhan hutan di Papua Barat, dengan kandungan sumber daya alam yang beraneka ragam, mulai dari flora, fauna, hasil-hasil tambang, dan lain sebagainya. Bahkan Pada 1980, *World Wild Foundation* atau WWF meminta dan mengusulkan hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk dalam cagar alam. Usulan ini ditindaklanjuti oleh Konservasi Internasional (CI) (Marten, 2019, para. 1).

Hutan *mangrove* yang terdapat di wilayah Teluk Bintuni merupakan salah satu sektor kehutanan yang sangat berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat dipesisir pantai Teluk Bintuni hidup dari hutan *mangrove* yang terdapat berbagai manfaat, seperti mencegah erosi pantai, tempat hidup biota laut yang bermanfaat menunjang mata pencaharian masyarakat (“Libatkan Masyarakat”, 2019, para. 4). Bagi masyarakat sekitar, hutan mangrove merupakan bagian penting untuk kehidupan mereka. Untuk pengembangan cagar alam, daerah kawasan hutan mangrove di Teluk Bintuni masuk dalam kawasan strategis sesuai Undang-Undang Tentang Penataan Ruang yaitu Undang-Undang

Nomor 26 tahun 2007, selain itu sebanyak 1,4 hektare dari luas hutan mangrove di Teluk Bintuni turut dikembangkan menjadi kawasan ekowisata (Aditiya, 2020, para. 26).

Berbicara soal suku, Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang mendiami ribuan Pulau Nusantara. Tentunya berbagai macam suku tersebut memiliki adat istiadat yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan aset kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu proses interaksi antara masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama dengan masyarakat lainnya. Menurut Gazalba dalam Teng (2017, p. 71) kebudayaan dapat didefinisikan sebagai cara berpikir yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam satu ruang dan waktu sehingga terjalinnya suatu kegiatan yang membentuk kesatuan sosial. Berbagai macam kebudayaan yang ada memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Setiap kelompok masyarakat yang berada di bumi memiliki sistem sosial dan budaya yang berbeda dan merupakan dasar hidup mereka, sehingga sistem sosial dan budaya yang dimiliki berpengaruh terhadap pola perilaku hidup masyarakat (Mansoben, 2003, p. 47). Tentunya sistem sosial dan budaya setiap kelompok masyarakat selalu berbeda, kondisi alam dan letak geografis dari masing-masing wilayah yang masyarakat diami mempengaruhi perbedaan tersebut.

Demikian juga di wilayah Teluk Bintuni terdapat 7 suku yang mendiami kawasan tersebut. 7 kelompok sub suku besar yang mendiami teluk Bintuni antara lain sub suku Sebyar, Wamesa, Kuri, Iratutu, Moskona, Sough, dan Sumuri (Suyanto, 2008, p. 164). Masyarakat Teluk Bintuni mengenal sistem kepemimpinan sejak nenek moyang mereka. Dalam karya ini penulis akan mengangkat menjadikan Suku Sebyar sebagai salah satu suku yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni karena berdasarkan keterangan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu warga Teluk Bintuni yang sedang berada di Jakarta suku tersebut menjadi suku induk dari 7 kelompok suku yang berada di wilayah Teluk Bintuni.

Suku Sebyar merupakan salah satu suku yang terdapat di Teluk Bintuni dan berada di beberapa distrik yaitu Distrik Tomu, Distrik Weriagar, dan Distrik Taroy. Suku Sebyar menjadi salah satu suku yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan. Meskipun sebagian besar masyarakat Suku Sebyar berprofesi sebagai nelayan, masyarakat Suku Sebyar menerapkan norma dan menjunjung tinggi aturan bahwa tidak boleh mengambil sesuatu dari alam secara berlebihan (Ariefin, komunikasi pribadi, 19 Agustus, 2021). Hal tersebut tentunya membuktikan bahwa masyarakat adat dianggap sebagai pewaris untuk menjaga alam dengan baik dan memahami bagaimana cara berhubungan dengan sesama manusia dan alam (United Nations, n.d., para. 1). Manusia sebagai salah satu makhluk sosial mempunyai hubungan yang erat, baik antara sesama manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya, maupun dengan lingkungan alam di mana manusia hidup dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Bahkan berbeda dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai suatu kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan manapun.

Menurut Tjahjono dalam Wibowo, Wasino & Setyowati (2012) menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan norma atau aturan yang ditaati oleh masyarakat setempat sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang melekat pada masyarakat tersebut. Kearifan lokal dapat menjadikan 4 penentu keberlangsungan masyarakat, dalam pengelolaan sumber daya alam di lingkungan dengan baik dan dapat meminimalisasi kerusakan alam yang marak terjadi (2012, p. 26). Hal tersebut memberikan makna bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan, kegiatan, dan kepercayaan suatu masyarakat dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

Meskipun menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam, pariwisata dan cerita sosial budaya, minimnya informasi tentang Teluk Bintuni masih menjadi permasalahan, karena jika dilihat dari realitas yang ada, media-media saat ini jarang memberikan informasi atau mengekspos daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Jika dilihat dari perspektif social-budaya, keragaman budaya Indonesia

hanya memiliki peluang yang kecil untuk bias hadir dalam pemberitaan media dan layar televisi yang dikuasai media-media besar di Jakarta (Armando, 2014, p. 41). Isu-isu tentang kemiskinan dan eksploitasi lingkungan yang terjadi di luar Pulau Jawa pun masih jarang tersentuh oleh media nasional. Dalam program berita, daerah tertentu masih tidak banyak mendapatkan ruang, hanya beberapa pemberitaan yang mendapatkan ruang dan pemberitaan itu harus “bombastis” baik berupa berita negatif seperti kasus kecelakaan, kriminal, maupun berita positif seperti sosok inspiratif. Konten yang diangkat dalam pemberitaan yang dikirim kotributor daerah tertentu masih ditentukan oleh pekerja media yang ada di Jakarta (Nuraeni, 2016, para. 5). Mayoritas media saat ini lebih memberikan pemberitaan yang ter-sentralisasi terhadap kota-kota besar seperti Jakarta, sehingga masyarakat kurang membuka mata terhadap kondisi di luar Pulau Jawa.

Tabel 1.1 Distribusi konten berdasarkan konteks geografis 10 stasiun televisi swasta, per pulau, tahun 2013

| Pulau                | Persentase Pemberitaan |
|----------------------|------------------------|
| Jawa                 | 69,6%                  |
| Papua                | 1,1%                   |
| Maluku               | 1,8%                   |
| Sulawesi             | 5,8%                   |
| Kalimantan           | 3,4%                   |
| Bali & Nusa Tenggara | 3,6%                   |
| Sumatra              | 14,7%                  |

Sumber: Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pulau jawa mendominasi konten pemberitaan dengan persentase sebanyak 69,6% pemberitaan terkonsentrasi di pulau Jawa. Jika diteliti lebih dalam lagi, menurut riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), dalam 69,6% pemberitaan yang terkonsentrasi di



pulau Jawa tersebut, terdapat 49% konten pemberitaan hanya terkonsentrasi di Jakarta, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur dengan 18,4% dan 16,9% (Nugroho et al., 2013, p. 37). Tentunya apa yang dibutuhkan masyarakat di setiap daerah bukan hanya informasi mengenai apa yang terjadi di kota-kota besar, namun juga kondisi yang terjadi di masing-masing daerah. Menurut Armando, implikasi penting dari adanya sentralisasi penyiaran dan pemberitaan di Indonesia adalah hilangnya potensi media-media di Indonesia sebagai sebuah *public sphere* yang dibutuhkan bagi demokratisasi di Indonesia (2014, p. 41).

Dalam sistem siaran yang tersentralisasi ini, para jurnalis dari berbagai daerah mengirimkan hasil liputan dan beritanya terlebih dahulu ke redaksi yang berada di Jakarta untuk ditentukan mana yang pantas untuk disiarkan kepada publik secara nasional (Armando, 2014, p. 42). Tentunya hal tersebut menyebabkan peluang yang sangat terbatas bagi setiap pemberitaan yang dikirim dari daerah untuk bisa dimuat dalam program berita media tertentu. Selain itu, setiap pemberitaan yang berasal dari daerah harus bersaing dengan berita di kota-kota besar seperti Jakarta yang seringkali dianggap memiliki nilai berita yang lebih tinggi.

Konglomerasi media juga menjadi salah satu penyebab media nasional lebih memilih untuk mendistribusikan informasi yang bersifat “Jakarta-sentris”. Menurut Tapsell (2017), akibat dari konglomerasi media ini pada membuat produksi berita dan informasi yang semakin 'Jakarta-sentris', karena pembangunan media yang sudah terpusat di Jakarta membuat semua keputusan media dilakukan oleh jurnalis dan orang-orang yang memiliki kepentingan dan berdomisili di Jakarta. (dalam Adam, 2018, para. 19).

Selain itu, meskipun badan lembaga penyiaran publik sudah ada sejak lama, pada kenyataannya masih banyak yang belum memahami pengertian sebenarnya dari penyiaran publik. Bahkan bagi kalangan pemilik media yang memiliki kepentingan masih banyak yang menganggap bahwa penyiaran publik itu sama

dengan penyiaran pemerintah, media massa yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia juga tidak melakukan upaya untuk mengedukasi dan memperkenalkan keberadaan penyiaran publik secara proporsional (Darmanto, 2020, p. 4).

Oleh karena itu, penulis akan merancang karya jurnalistik berbentuk video dokumenter. Pembuatan karya ini berkolaborasi dengan dua rekan penulis, sehingga karya ini dikemas dalam bentuk serial dokumenter yang terdiri dari enam episode. Tentunya, serial dokumenter ini memiliki benang merah dalam setiap episode. Dokumenter merupakan sebuah program yang menyajikan suatu cerita nyata dan dilakukan di lokasi sesungguhnya, di dukung narasi untuk melengkapi cerita. Menurut Warren Buckland, terdapat tiga syarat sebuah video dapat dikatakan dokumenter. Pertama, peristiwa atau kejadian yang diangkat tidak direayasa dan dapat memberikan makna, tidak hanya sekedar merekam. Kedua, secara konvensional video dokumenter merupakan film non-fiksi, segala hal yang diceritakan di dalamnya bukan imajiner. Ketiga, semua kru yang bertugas untuk membuat dokumenter sering diasumsikan merekam dan mengamati peristiwa secara obyektif (Buckland, 2015, p.154).

Program dokumenter bukan hanya sekedar suatu cerita, tetapi merupakan urutan kejadian baik yang sudah terjadi di masa lampau ataupun yang sedang terjadi saat ini, sehingga dalam proses produksinya terkadang tidak terlalu memerlukan sinopsis, tetapi hanya *treatment* sebagai kerangka cerita yang mengandung benang merah atau garis besar penuturan alur cerita dengan urutan peristiwa dan kejadian secara mendalam (Latief & Utud, 2015, p. 42). Sedangkan, Fred Wibowo (1997, p. 146) menjelaskan bahwa program video dokumenter merupakan suatu program yang menyajikan suatu kenyataan berdasarkan fakta objektif yang memiliki nilai eksistensial dan esensial, yaitu pengemasan urutan kejadian yang menyangkut dengan lingkungan hidup, kehidupan, dan situasi nyata.

Tujuan Penulis membuat karya ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia terutama generasi Y dan generasi Z tentang kehidupan sosial,

ekonomi, kebudayaan, dan potensi kekayaan alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Penulis memilih sasaran penonton untuk generasi Y dan Z karena kedua generasi tersebut memiliki karakteristik kehidupan yang sesuai dengan tujuan karya yang akan penulis buat yaitu memberikan pengetahuan mengenai perpaduan kebudayaan, kekayaan alam, dan tradisi yang harus dilestarikan untuk memperluas wawasan terkait kebudayaan nusantara. Menurut Horovitz (dalam Suryadi, 2015, p. 2) kategori generasi Y yang juga disebut generasi milenial merupakan kelompok generasi yang lahir awal 1980 an hingga awal 2000 an.

Generasi Y dianggap sebagai sosok yang memiliki sikap toleransi dan rasa yang kuat terhadap suatu komunitas, baik dalam skala lokal ataupun global (Suryadi, 2015, p. 2). Sementara itu, generasi Z memiliki kecenderungan terhadap teknologi dan informasi. Menurut Putra, informasi dan teknologi menjadi bagian dari kehidupan generasi Z, karena generasi tersebut lahir saat akses internet dan informasi mudah untuk ditemui, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pandangan, nilai-nilai, dan tujuan hidup bagi generasi Z (2017, p. 132). Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan penulis yang ingin menjadikan *YouTube* sebagai tempat untuk pendistribusian karya.

Selain itu penulis berharap terhadap generasi Y dan generasi Z dapat menjadi penggerak untuk membantu dalam memajukan dan mengembangkan daerah atau desa yang tidak tersentuh oleh pemberitaan atau informasi. Tentunya hal tersebut sesuai dengan program pemerintah dalam hal memajukan desa wisata yang unggul, *sustainable*, dan memiliki daya saing. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, generasi milenial dan generasi Z memiliki kreativitas dan pemikiran yang luar biasa dalam menciptakan suatu ide cemerlang dan terobosan yang menarik (“Peran Milenial”, 2021, para. 2).

Tentunya segala bentuk informasi terkait potensi alam dan kebudayaan yang terdapat di Teluk Bintuni perlu disampaikan secara jelas agar dapat menjadi

perhatian publik. Proses penyebaran informasi di era yang serba praktis dengan kemunculan internet saat ini memudahkan manusia dalam bertukar informasi. Berdasarkan hasil riset oleh *Hootsuite* dan *We Are Social* mengenai *Global Digital Report 2021*, dari total populasi 274,9 juta penduduk, Indonesia mencetak 202,6 juta pengguna internet hingga Januari 2021 (Stephanie, 2021, para. 3). Hal tersebut menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen pada Januari 2021.

Selain itu, kemunculan dan perkembangan teknologi komunikasi pada akhirnya membawa media massa berkembang menjadi media baru. Media baru memanfaatkan perangkat teknologi komunikasi yang terus berkembang, dan memungkinkan adanya digitalisasi yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi dan informasi (McQuail, 2011, p.151). Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi media sebagai penyebaran informasi yang mampu menjangkau banyak khalayak dengan serempak dan cepat

Dalam hal ini, teori yang akan penulis gunakan adalah teori media baru atau *new media theory*. Kemunculan media baru dan teknologi informasi di era saat ini memungkinkan digitalisasi informasi melalui *audio visual* yang dapat disimpan, diolah, dan dapat ditransmisikan dengan mudah dan cepat melalui komputer digital (Sugiharti, 2014, p. 70). Perubahan tersebut ditandai dengan adanya pergeseran dalam ruang lingkup media yang dinamakan media baru. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa saat ini perpaduan antara praktik jurnalisme multimedia dan teknologi informasi semakin berkembang dalam bidang jurnalisme. Internet dan *world wide web* yang bagian dari media baru merupakan hasil revolusi teknologi komunikasi dan informasi.

Media baru juga sangat berhubungan erat dengan konsep konvergensi media baru. Menurut Jenkins dalam Friedrichsen & Kamalipour (2017, p.78) konvergensi media baru didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan dan penyatuan di mana teknologi informasi, konten, pemirsa, dan industri saling berhubungan. Hal ini

berkaitan dengan pemanfaatan penyebaran informasi tentang Teluk Bintuni dalam bentuk visual. Media baru dapat menawarkan suatu kapasitas untuk memperluas *volume* informasi yang memungkinkan setiap individu mendapatkan informasi tersebut. Selain itu, McQuail (2000, p. 119) berpendapat bahwa kebanyakan media baru saat ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang bersifat interaktif dan memungkinkan adanya penerimaan informasi yang luas bagi khalayak. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi media baru, diharapkan karya program dokumenter ini dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Metode yang akan diterapkan dalam produksi program ini adalah metode etnografi komunikasi. Menurut Kusnadi (2013, p. 13), metode etnografi komunikasi seringkali digunakan sebagai metode alternatif untuk melakukan observasi secara langsung, meneliti latar, proses, dan tujuan komunikasi serta memahami kebiasaan atau perilaku sosial budaya pada suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu interaksi sosial. Etnografi komunikasi mengacu pada pengertian ilmiah sosial tentang bagaimana kehidupan kelompok masyarakat tersebut dan landasan budaya kemanusiaan (Denzin, 2009, p. 30). Dalam hal ini, penulis bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan dan kebudayaan masyarakat Teluk Bintuni dan Suku Sebyar yang dikemas dalam bentuk program dokumenter.

Dalam karya ini penulis memilih *YouTube* sebagai medium dalam menyebarluaskan karya yang akan penulis buat. Penulis bekerjasama dengan media *Narasi*. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menjangkau lebih luas khalayak atau penonton karena *Narasi* memiliki jumlah penonton yang sangat tinggi dalam *platform YouTube*. *Narasi* juga memiliki visi misi dan agenda yang sama dengan karya yang ingin penulis buat, yaitu membuat konten-konten pemberitaan yang mengkritik, mengangkat isu-isu, dan kesenjangan sosial. Selain itu, penulis memilih *YouTube* sebagai medium dalam menyebarkan karya program dokumenter karena *YouTube* merupakan sebuah situs web berbagi video yang populer sehingga pengguna dapat mengunggah, menonton, dan berbagi klip video secara gratis

(Faiqah, Nadjib, & Amir, 2016, p. 259). Selain itu, berdasarkan hasil survei *We Are Social* dan *Hootsuite* (2021, p. 33) pengguna media sosial *YouTube* hingga Januari 2021 menempati urutan tertinggi ke-2 di Indonesia sebagai situs yang sering dikunjungi. Sedangkan jumlah pengguna media sosial *YouTube* mencapai 93,8 persen pada Januari 2021.

Dengan menerapkan prinsip jurnalisme positif, diharapkan karya ini dapat membantu pemerintah dalam menangani persoalan yang ada di Teluk Bintuni sekaligus membuka mata masyarakat Indonesia tentang fakta yang sebenarnya terjadi di Teluk Bintuni. Tentunya kehadiran jurnalisme positif ini menawarkan perspektif baru dalam pemberitaan. Jurnalisme positif menekankan peran pers sebagai pencerahan, dan bisa menumbuhkan optimisme sebagai bangsa.

Berdasarkan sejumlah argumentasi di atas, pembuatan karya ini menjadi penting karena karya ini bertujuan untuk memberikan informasi tidak hanya memfokuskan pada potensi kekayaan alam dan kebudayaan yang ada di Teluk Bintuni, tetapi juga kritis untuk memberikan informasi mengenai persoalan dan fakta yang sedang terjadi di Teluk Bintuni. Diharapkan karya ini dapat membantu pemerintah untuk memberikan solusi dalam menangani persoalan yang sedang terjadi dengan menempatkan suara masyarakat adat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

## **1.2. Tujuan Karya**

Dalam pembentukan karya program video dokumenter “Rumah Torang”, terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai,

1. Memberikan pengetahuan mengenai perpaduan kebudayaan, kekayaan alam, dan tradisi yang harus dilestarikan untuk memperluas wawasan terkait kebudayaan nusantara.
2. Menghasilkan produk yang bisa diakses melalui *platform YouTube* secara *on demand*.
3. Memberikan tempat bagi masyarakat untuk bersuara.

4. Diharapkan karya ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pembuatan karya selanjutnya dan sarana kajian ilmu komunikasi atau jurnalistik mengenai kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan.

### **1.3. Kegunaan Karya**

Kegunaan yang ingin penulis capai melalui karya ini antara lain,

1. Dengan mengedepankan nilai-nilai jurnalistik, diharapkan karya ini menjadi salah satu sumber informasi untuk masyarakat Indonesia mengenai potensi alam dan kebudayaan yang ada di Teluk Bintuni.
2. Untuk menambah metode penelitian dan pengetahuan bagi ilmu jurnalistik dalam membuat video dokumenter.
3. Untuk membuka mata masyarakat Indonesia terhadap Papua Barat khususnya Teluk Bintuni.
4. Membantu pemerintah dalam menangani persoalan yang ada di Teluk Bintuni

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA